

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati¹. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya.² Perjanjian jual beli ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu b2b (business to business) dan b2c (business to customer). Perjanjian jual beli business to customer merupakan jual beli antara penjual dan langsung dengan pembeli, sistem ini merupakan sistem yang biasa dilakukan dalam hal jual beli.³ Sedangkan b2b apabila penjualan barang tersebut dijual dari suatu perusahaan dan dibeli oleh perusahaan lain.⁴ Oleh perusahaan lain tersebut barang tersebut dijual kembali ke konsumen atau diolah terlebih dahulu sebelum dijual. Proses sistem jual beli b2b ini biasanya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh marketplace Lazada yang menggunakan sistem b2b dalam jual beli yang dilakukan.

¹ Daniel, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

² *Perjanjian*, diakses dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 5 Juli 2018 pukul 18:00

³ Ajeng, Andi, 2017, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*, UIN Alauddin Makassar, Hal 19.

⁴ *Perbedaan B2B dan B2C, Serta Cara Maksimalkan Keuntungan B2B*, diakses dari <https://www.fastpay.co.id/blog/perbedaan-b2b-dan-b2c-serta-cara-memaksimalkan-keuntungan-b2b.html>, pada 12 Januari 2017 pukul 12:00

Tentunya Lazada membutuhkan suatu kerjasama dengan para *seller* menjualkan barangnya di website mereka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Marketplace oleh pihak Lazada. Disinilah permasalahan mulai timbul, banyak terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual nakal yang tentunya berimbas pada kepercayaan kepada marketplace Lazada ini berkurang. Padahal marketplace lazada sendiri sudah membentengi diri dengan melakukan perjanjian pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik terlebih dahulu kepada sellernya, namun tetap saja banyak seller nakal yang tidak mengirimkan barang semestinya untuk pembeli di marketplace tersebut. lalu apakah benar perjanjian ini sah menurut hukum, perlu diketahui bahwa hukum ada untuk melindungi, karena apabila perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur “keabsahan” maka tentu saja tidak bisa dijadikan alat untuk melindungi pihak Lazada.

Di Indonesia sendiri perjanjian di atur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Sehingga bila dilihat dari konteksnya karena melalui sistem elektronik maka perjanjian ini lebih tepat dikatakan sebagai Kontrak Elektronik. Dilihat dari kontennya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUHPerdata. Hal tersebut di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, syarat tersebut adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.⁵ Permasalahan terjadi apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut (*seller*) tidak cukup umur untuk melakukan perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam melakukan perjanjian pihak marketplace dengan *seller* tidak bertemu secara langsung. Permasalahan lain adalah mengenai barang yang diperdagangkan. Bisa terjadi kemungkinan yang dilakukan oleh *seller*, yaitu dengan menjual barang palsu atau tiruan. Permasalahan tersebut haruslah menjadi sorotan perusahaan, karena akan berdampak pada perusahaan tersebut. Maka harus diteliti lebih lanjut apakah kontrak elektronik (Perjanjian Marketplace) yang dilakukan pihak Marketplace Lazada tersebut bisa dikatakan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE.

Dari uraian yang sudah dituliskan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERJANJIAN PENYEDIA BARANG ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE).”

⁵ Muhammad Billah Yudhian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar :Universitas Hasanuddin, hal.17.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki pendapat bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Perjanjian Marketplace dengan Seller sah menurut KUH Perdata dan UU ITE?
2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antar *seller* dengan marketplace?
3. Bagaimana cara agar dapat meminimalisir terjadinya penipuan dalam perjanjian elektronik?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Peneilitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian marketplace dilihat dari hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk memberikan suatu bentuk bagaimana suatu kontrak elektronik yang sah menurut hukum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal terjun ke dalam masyarakat nantinya.

D. Kerangka Pemikiran

Melakukan suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat, dan saat ini proses melakukan perjanjian tersebut menjadi lebih mudah dengan adanya perjanjian elektronik (kontrak elektronik). Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau secara sederhana dikatakan dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Ketika melakukan perjanjian, secara otomatis membuat pihak satunya mengikatkan diri kepada pihak yang lainnya. Perjanjian elektronik sendiri di artikan sebagai Kontrak Elektronik dalam UU ITE yang berarti perjanjian para pihak yang dibuat melalui elektronik. Kontrak elektronik atau perjanjian elektronik ini sebenarnya sama saja dengan perjanjian konvensional,

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, hal. 1.

hanya caranya saja yang berbeda. Perjanjian elektronik dewasa ini sudah sering digunakan. Termasuk dalam melakukan perjanjian marketplace Lazada.com yang melakukan perjanjian marketplace kepada *seller* yang berjualan melalui website milik Lazada.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan dalam pasal 1320 bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat tersebut juga berlaku untuk perjanjian elektronik yang dilakukan oleh Lazada.

Karena perjanjian elektronik ini dilakukan secara *online*, maka sangat mungkin bahwa syarat untuk menjadi perjanjian yang sah menurut KUH Perdata tidak bisa dipenuhi. Seperti pemalsuan identitas untuk menutupi cakap atau tidaknya salah satu pihak dan keaslian dari barang yang akan diperdagangkan bisa saja dipalsukan karena perjanjian tidak dilakukan dengan bertatap muka. Hal ini bisa saja terjadi karena memang perjanjian semacam perjanjian elektronik belum di atur secara khusus oleh Undang-Undang.

Perjanjian secara elektronik ini juga memungkinkan terjadi wanprestasi seperti perjanjian pada umumnya.⁷ Dikarenakan perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang mungkin berjarak sangat jauh penyelesaian sengketa seperti wanprestasi ini bisa dikatakan tidak begitu efektif.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan normatif (yudiris). Artinya adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk melihat kebasahan dari perjanjian marketplace yang dilakukan oleh Lazada.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini memiliki maksud untuk menjelaskan secara rinci mengenai subyek ataupun obyek hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan suatu penjelasan secara rinci mengenai keabsahan kontrak elektronik Perjanjian Marketplace Lazada.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

⁷ Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro, 2013, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, hal. 126.

⁸ Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Solo : Fakultas Hukum UniVersitas Sebelas Maret, hal. 9.

a. Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data yang secara langsung menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini maka yang menjadi data primer merupakan isi dan proses dalam melakukan Kontrak Elektronik Perjanjian Marketplace dari Lazada.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi bahan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder termasuk KUH Perdata, UU ITE dan juga buku-buku lain yang mendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara meneliti mengenai kontrak elektronik perjanjian marketplace mulai dari cara melakukan perjanjian (proses) hingga isi dari perjanjian tersebut.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang kemudian dianalisis, lalu data tersebut dijadikan rujukan untuk mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Penelitian ini akan disusun menjadi empat bab untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis serta penjabaran isi dari penelitian ini adalah dengan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Perjanjian Pada Umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat sahnya Perjanjian
 - 3. Unsur-unsur Perjanjian
 - 4. Asas-asas Perjanjian
 - 5. Wanprestasi
- B. Perjanjian Elektronik
 - 1. Pengertian Perjanjian Elektronik
 - 2. Bentuk Perjanjian Elektronik
- C. Marketplace

1. Pengertian Marketplace
2. Jenis Sistem Dalam Marketplace

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perjanjian Jual Beli Elektronik
- B. Keabsahan Perjanjian
- C. Keabsahan Perjanjian Elektronik Marketplace
- D. Masalah Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Marketplace
- E. Upaya Meminimalisir Permasalahan Dalam Perjanjian Marketplace
- F. Penyelesaian Sengketa Marketplace

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN